

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI DAN EKOWISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Hari Rujito
Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember
Email: hrujito2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengkaji efektivitas pengembangan Model Desa Konservasi (MDK) dan ekowisata di sekitar kawasan TNMB yang merupakan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan TNMB dan (ii) menyusun "Road Map" yang sesuai bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat pada masing-masing desa konservasi dan ekowisata di kawasan TNMB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif TEV dan metode kualitatif PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Lokasi penelitian adalah di kawasan TN Meru Betiri yang meliputi 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Wilayah I Sarongan (Rajegwesi), Seksi Wilayah II Ambulu dan Seksi Wilayah III Rajegwesi dan Kalibaru (Kebunrejo). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di TNMB Banyuwangi cukup bagus, sedangkan di kawasan TNMB Jember pencapaian hasilnya biasa-biasa saja dan masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Ekowisata, Kawasan TNMB, MDK, Metode TEV, Pemberdayaan Masyarakat, PRA, Road Map, social-forestry.

Abstract

This study aims to (i) assess the effectiveness of the development of Model Villages Conservation (MDK) and ecotourism in the area around the national park which is a strategy of economic empowerment in the region TNMB and (ii) to compile a "Road Map" that correspond to the development of community empowerment in each village conservation and ecotourism in the area TNMB. The method used is a method of quantitative and qualitative methods TEV PRA (*Participatory Rural Appraisal*). The location of research is in the area of Meru Betiri which includes three (3) sections: Section Area I Sarongan (Rajegwesi), Section Ambulu Region II and Region III Section Rajegwesi and Kalibaru (Kebunrejo). The results showed the achievement of community development activities in Banyuwangi TNMB is pretty good, whereas in the region for achieving results TNMB Jember mediocre and still needs to be improved.

Keywords: Community Empowerment, Ecotourism, Method TEV, MDK, PRA, Road Map, social-forestry, TNMB Region.

PENDAHULUAN

Taman Nasional Meru Betiri (= TNMB) memiliki luas areal 58.000 ha meliputi daratan seluas 57.155 ha dan perairan 845 ha terletak di ujung timur Jawa Timur bagian selatan yaitu di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. TNMB mempunyai beberapa fungsi yaitu **fungsi strategis**,

karena di dalamnya terdapat **keanekaragaman hayati (*mega bio-diversity*) flora** dan **fauna** serta memiliki **fungsi penyangga** untuk mendukung kehidupan lain. Dengan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka **rehabilitasi** kawasan TNMB **harus dilakukan** karena pada tahun 1998 (**awal reformasi**) kawasan ini telah mengalami ***illegal logging*** dan **penjarahan besar-besaran** khususnya terhadap hutan jati serta **mengalami okupasi** oleh oknum masyarakat.

Penelitian Hamid, Zulkarnaeni dan Saam (2011) menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan karena keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan hutan itu sendiri. Intensitas interaksi yang berlangsung baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap keberadaan kelangsungan suatu kawasan hutan, hal tersebut karena sebagian besar aspek penyokong kehidupan diperoleh dan berasal dari hutan, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat di sekitar hutan (PKHR UGM, 2007).

Terjadinya pencurian kayu dan perambahan hutan di kawasan TNMB tidak bisa dilepaskan dari kondisi taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan yang masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya. Tahun 2001 Balai TNMB telah berusaha melakukan rehabilitasi & penyelamatan kawasan TNMB dengan melibatkan masyarakat melalui kemitraan rehabilitasi dengan tujuan untuk : (a) Merehabilitasi kawasan yang rusak melalui pelibatan masyarakat (b) menjaga kelestarian hutan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut memiliki kawasan TNMB. Namun hingga program ini berjalan 10 tahun, efektivitasnya belum optimal karena selain target rehabilitasi yang diharapkan belum terpenuhi juga masih sering terjadi pencurian kayu dan perambahan hutan (Rujito, 2011).

Pada tahun 2011 Balai Taman Nasional Meru Betiri berusaha melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan berbasis pada konteks sociocultural lokal kawasan TNMB melalui program-program intervensi sosial dan ekonomi. Model pemberdayaan masyarakat di kawasan TNMB berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan **Model Desa Konservasi (MDK) dan ekowisata** di beberapa seksi pengelolaan TNMB. Model pemberdayaan ini dilakukan dengan cara (i) melakukan pembentukan/kelembagaan komunitas masyarakat (ii) meningkatkan kapasitas masyarakat di kawasan dan (iii) pengembangan usaha bagi komunitas masyarakat binaan (iv) pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi kawasan; serta (v) program pendampingan pada masyarakat.

Penguatan kelembagaan komunitas masyarakat dilakukan dengan cara membentuk kelompok baru atau memperkuat kelompok yang sudah ada di kawasan TNMB melalui pembelajaran kelompok, peningkatan kapasitas anggota untuk melakukan usaha bersama. Sedangkan **penguatan kapasitas masyarakat** dilakukan dengan memberikan ketrampilan kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang banyak di sekitarnya (BTNMB,2011). Pelatihan-pelatihan yang dilakukan yaitu seperti pelatihan jamur tiram, pembuatan pakan ternak alternatif, pembuatan bokashi, budidaya empon-empon, budidaya lele organik, pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), pelatihan pemandu wisata dan pengelolaan *Eco-Homestay* untuk mendukung ekowisata, pembuatan biogas dan lain-lainnya yang pada akhirnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun **pengembangan usaha** komunitas dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan kapasitas yang diperolehnya dari pelatihan ke dalam bentuk usaha (Darmadja dkk., 2012). **Kegiatan pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi kawasan** dilakukan dengan cara melibatkan warga dalam program kemitraan dengan TNMB melalui pemberian hak pengelolaan atas lahan dalam luasan tertentu (0,5 ha) dan petani diwajibkan lahan tersebut dengan tanaman pokok yang sudah ditentukan oleh TNMB dan sementara tanaman pokok belum tumbuh besar petani diperkenankan menanam lahan tersebut dengan tanaman pertanian agar meningkat pendapatannya. Namun pemberian kepercayaan kepada komunitas masyarakat sekitar hutan untuk ikut mengelola hutan secara bertanggung jawab tidaklah selalu berjalan baik. Dalam kasus pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Nepal sebagaimana dilaporkan oleh Lachapelle, Cool dan Smith (2004) menunjukkan adanya gap antara kenyataan dengan apa yang diharapkan. Kondisi serupa juga terjadi di lahan rehabilitasi kawasan TNMB di mana target perkembangan tanaman sesuai waktunya belum dapat dipenuhi.

Sedangkan **pendampingan pada komunitas masyarakat** sekitar kawasan TNMB dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kelestarian TNMB dalam mendukung sistem kehidupan yang ada. Pendampingan juga untuk memper-kuat kelembagaan komunitas masyarakat dalam membantu menjaga keamanan TNMB.

Secara garis besar semua aspek-aspek pemberdayaan masyarakat yang perlu diamati dan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan penilaian anggota komunitas masyarakat sesuai dengan apa yang dirasakannya dapat dirinci dan jelaskan sebagai berikut :

(01) *Pembinaan Kelompok* adalah proses pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan oleh petugas Balai TNMB kepada komunitas masyarakat di sekitar kawasan TNMB

(02) *Pembelajaran Kelompok* adalah proses belajar yang dialami anggota kelompok karena adanya pendampingan maupun karena adanya interaksi, *sharing*, kerjasama antar anggota.

(03) *Partisipasi Anggota Kelompok* adalah tingkat keaktifan anggota-anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang rutin maupun tidak di dalam kelompoknya.

(04) *Aktivitas Kelompok* adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi rencana/program kelompok.

(05) *Pelatihan ketrampilan* adalah melatih masyarakat untuk menguasai jenis ketrampilan tertentu.

(06) *Pemanfaatan Ketrampilan* adalah kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan ketrampilannya guna melakukan usaha yang secara ekonomi dapat menghasilkan uang atau meningkatkan pendapatannya.

(07) *Peningkatan Pengetahuan dan Sikap* adalah peningkatan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang melimpah di sekitar kawasan menjadi sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi.

(08) *Bantuan Modal Usaha* adalah bantuan permodalan bergulir dari Balai TNMB atau dari pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

(09) *Dukungan Pembinaan* adalah bimbingan teknis dan pengelolaan dari Balai TNMB kepada usaha masyarakat (misalnya: bimbingan budidaya jamur tiram, *home stay*, biogas, dll).

(10) *Pengembangan Usaha Milik Masyarakat* adalah pengembangan usaha masyarakat melalui dukungan pengelolaan usaha dan permodalan serta mendorong sinergi kerjasama kelompok.

(11) *Peningkatan Pendapatan Masyarakat* adalah target peningkatan pendapatan masyarakat minimal sebesar Rp 800.000/bulan di tahun 2014 sebagai akibat adanya usaha ekonomi produktif masyarakat.

(12) *Fasilitasi Akses ke Lembaga Keuangan (penyedia modal)* adalah bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan penyedia modal usaha.

(13) *Sikap dan Kesadaran Masyarakat* (terhadap lingkungan TNMB) adalah sikap dan kesadaran masyarakat dalam untuk mendukung rehabilitasi, keamanan dan kelestarian kawasan TNMB.

(14) *Partisipasi Masyarakat* adalah aktivitas nyata dari masyarakat di sekitar kawasan TNMB untuk ikut berperan serta mendukung keamanan, rehabilitasi dan pelestarian kawasan.

(15) *Dukungan Masyarakat Pada Program (Rehabilitasi)* adalah efektivitas peran serta masyarakat dalam mendukung rehabilitasi kawasan dengan melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok.

(16) *Pengetahuan Pendamping* adalah penguasaan pengetahuan dari pendamping/fasilitator.

(17) *Intensitas Pendampingan* adalah frekuensi kegiatan pendampingan pada masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu.

(18) *Kesesuaian Materi Pendampingan* adalah kesesuaian antara materi pendampingan yang diperlukan masyarakat dengan materi pendampingan yang diperoleh masyarakat.

(19) *Aktualisasi Materi Pendampingan* adalah penyesuaian materi pendampingan kepada masyarakat dengan kondisi aktual di lapangan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

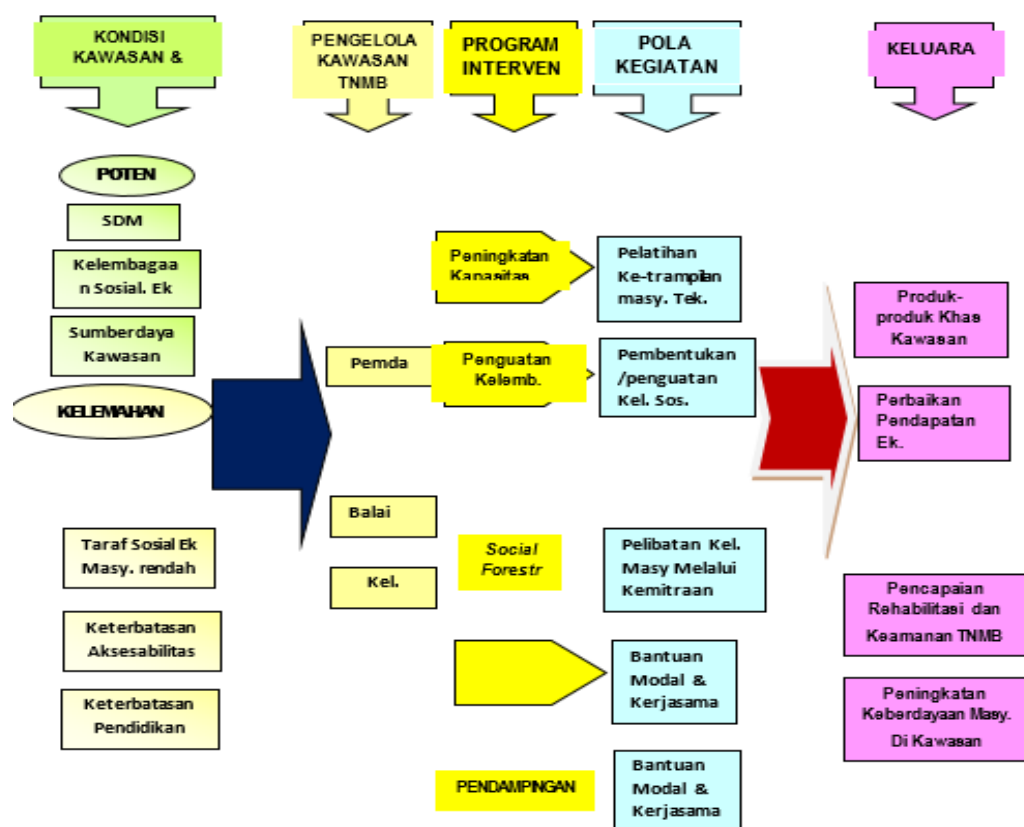
(20) *Pengalaman Pendamping* adalah pengalaman fasilitator dalam mendampingi masyarakat dilihat dari lamanya bekerja dilapangan maupun dari banyaknya masalah yang dihadapi

Masalahnya aspek-aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan MDK tersebut belum pernah dievaluasi efektivitasnya. Sementara di lapangan pemberdayaan tersebut pendekatannya lebih ke arah proyek, kurang intensif dan belum terukur efektivitasnya. Kelemahan apa yang perlu diperbaiki dan potensi apa yang perlu dikembangkan belum diketahui. "Road Map" yang sesuai bagi masing-masing MDK sebagai pedoman arah pengembangan pemberdayaan masyarakat di kawasan itu juga belum ada. Untuk itu penelitian ini mempelajari sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan dan perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Bagaimanakah *Road Map* yang harus dilalui dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui pengembangan MDK di masa mendatang?

Tujuan penelitian ini adalah (a) mengukur sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui Model Desa Konservasi di sekitar kawasan TNMB dan (b) menyusun *Road Map* yang sesuai bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masing-masing desa MDK di kawasan TNMB di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Kerangka pemikiran untuk melihat permasalahan penelitian secara utuh, digambarkan dalam Model Input-Output Pemberdayaan Masyarakat kawasan TNMB sebagai berikut:



Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Model Pemberdayaan Masyarakat Kawasan TNMB

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sekaligus juga kualitatif. Pendekatan kuantitatif dimaksudkan agar cara pandang dan penilaian terhadap obyek penelitian dapat lebih terukur dan spesifik sedangkan pendekatan kualitatif memandang obyek penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan kuantitatif menggunakan Model TEV (*Tree Expected Value*) sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan model PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

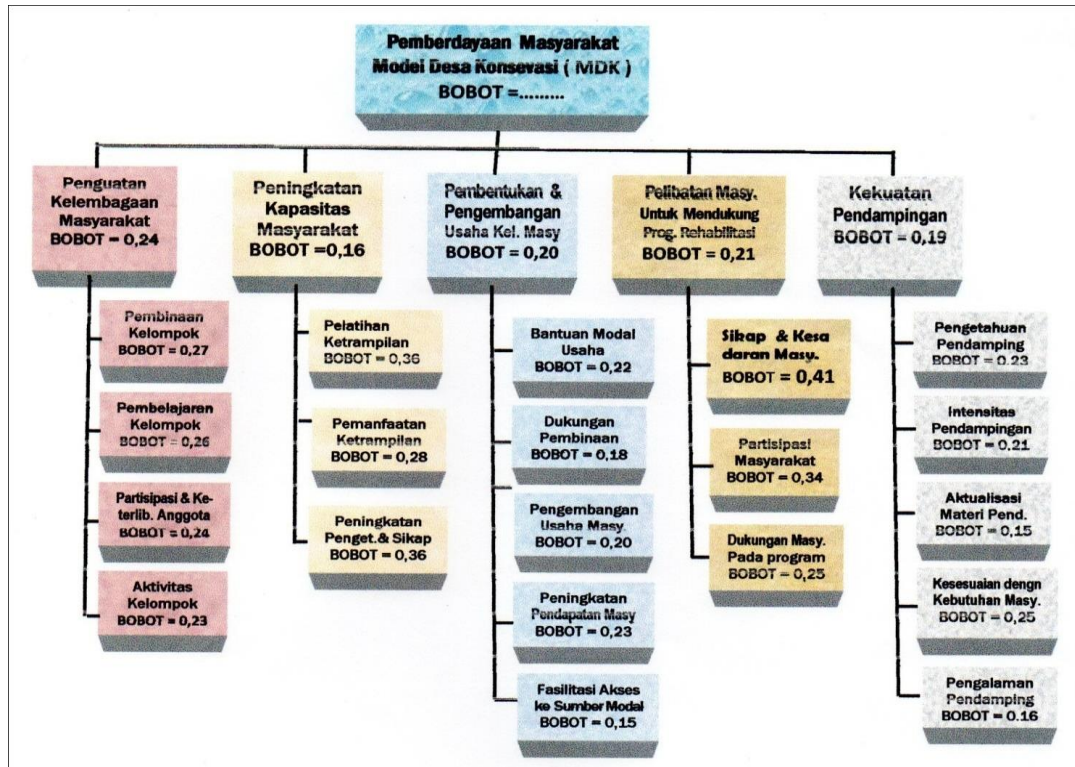
Model TEV dimulai dengan cara membentuk *Decision Tree* dari obyek yang akan diukur, mendiskripsikan jadi dimensi, parameter, kategori. *Decision Tree* tersebut kemudian divalidasi oleh 30 orang *expert* dan diberi bobot. Formula yang dipakai untuk membobotkan sebagai berikut :

$$A = \frac{\sum_{j=1}^m a_{ij} (m+1)}{\sum_{k=1}^m nk ; i=1}$$

Dimana :

- a_{ij} = jumlah pakar yang menilai A berperingkat ke j
- n = jumlah pakar yang melakukan pembobotan
- m = jumlah unsur dalam tiap kelompok anak cabang pohon

Adapun gambar dari *decision tree* untuk masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram pohon sebagai instrumen penilaian efektifitas pemberdayaan masyarakat

Model diagram pohon keputusan tentang pemberdayaan masyarakat yang disusun terdapat 5 (lima) unsur masing-masing adalah (i) Penguatan kelembagaan masyarakat mempunyai 4 indikator; (ii) Peningkatan kapasitas masyarakat mempunyai 3 indikator; (iii) Pengembangan usaha masyarakat memiliki 5 indikator; (iv) Pelibatan masyarakat untuk mendukung rehabilitasi kawasan memiliki 4 indikator; dan (v) Pendampingan meliputi 5 indikator.

Langkah-langkah penelitian menggunakan diagram pohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemberian bobot semua unsur pada diagram pohon diberikan oleh seluruh pakar (*expert*) yang tadinya diminta untuk memberi revisi dan masukan pada model konseptual awal
- Setelah pembobotan tuntas dilakukan, maka selanjutnya kuesioner disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator semua unsur diagram pohon.
- Tahap berikutnya adalah melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data operasional tentang penilaian efektivitas dan manfaat pemberdayaan melalui MDK di TNMB

- Skala pengukuran dalam kuesioner yang dipakai untuk menanyakan penilaian responden terhadap apa yang ditanyakan menggunakan skala *Likert 5* (lima) jenjang

Hasil survei lapang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap indikator-indikator dari tiap unsur dalam diagram pohon. Formula penilaian dan contohnya adalah sebagai berikut:

$$EV = \sum_{i=1}^n ki \cdot pi$$

Dimana: X = indikator yang dinilai, k = nilai kategori jawaban parameter yang ke i, p = probabilitas responden yang menilai parameter ke i sebesar k, n = banyaknya parameter yang tercakup dalam indikator.

HASIL PENELITIAN

Pembobotan Unsur-unsur Dalam Model

Setelah model yang dibangun tersebut mendapatkan masukan-masukan dari seluruh pakar (sebanyak 30 pakar) hingga menjadi diagram pohon optimal, selanjutnya oleh masing-masing pakar tersebut diminta untuk menentukan tingkat kepentingan dari masing-masing aspek di setiap cabang diagram pohon tersebut. Data tentang jumlah pakar yang menentukan tingkat kepentingan dari *layer* pertama diagram pohon dapat dilihat pada Tabel 1.

Selanjutnya formula yang dipakai untuk pembobotan adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{\sum_{j=1}^m a_{ij} (m + 1 - j)}{\sum_{k=1}^m nk ; i = 1, 2, 3, \dots m}$$

dimana: **A_i** = Nilai bobot unsur ke i, **a_{ij}** = jumlah pakar yang menilai A berperingkat ke j, **n** = jumlah pakar yang melakukan pembobotan, **m** = jumlah unsur dalam tiap kelompok anak cabang pohon

Perhitungan pembobotan masing-masing aspek sebagai berikut :

1. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Penguatan Kelembagaan Masyarakat (PEKELEM) = 0,24
2. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PEKAPAM) = 0,16
3. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Mendorong Pengembangan Usaha Milik Masy. = 0,20
4. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Pelibatan Masy. Dalam Rehabilitasi (PMDR) = 0,21

5. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Kekuatan Program Pendampingan (KPP) = 0,19

Tabel 1. Hasil penentuan tingkat kepentingan setiap aspek pada layer pertama dari urutan satu s/d 5 pada diagram pohon optimal.

ASPEK-ASPEK UTAMA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAWASAN TNMB	URUTAN KEPENTINGAN				
	1	2	3	4	5
a. Penguatan Kelembagaan Masyarakat (PEKELEM)	9	8	7	3	3
b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PEKAPAM)	3	5	4	9	9
c. Mendorong Pengembangan Usaha Kel. Masy.(PUKM)	6	5	6	7	6
d. Pelibatan Masy. Dalam Rehabilitasi (PMDR)	7	6	7	5	5
e. Kekuatan Program Pendampingan (KPP)	5	6	6	6	7

Selanjutnya dengan cara yang sama setiap unsur pada lapis ke 3 di bawah setiap unsure pada lapis ke dua juga ditentukan bobotnya oleh para pakar dengan cara yang sama sehingga diperoleh untuk aspek Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk bobot dari masing-masing unsur di bawahnya adalah sebagai berikut :

1. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Pembinaan Kelompok = 0,27
2. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Pembelajaran Anggota Di dalam Kelompok = 0,26
3. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Partisipasi & Keterlibatan Anggota Kelompok = 0,24
4. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Aktivitas Program Kelompok = 0,23

Adapun unsur-unsur lapis ke tiga di bawah Aspek Peningkatan Kapasitas Masyarakat diperoleh *score* sebagai berikut :

1. Bobot Kepentingan Aspek Pelatihan Ketrampilan Pada Masyarakat = 0,36
2. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Pemanfaatan Ketrampilan Masyarakat = 0,28
3. *Score* Bobot Kepentingan Aspek Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Positif Masy. = 0,24

Dengan cara sama seluruh unsur dalam diagram pohon ditentukan bobotnya masing-masing dan selanjutnya dibuat kuesioner sesuai dengan banyaknya dimensi yang ada dalam kelompok untuk menentukan tingkat pencapaian hasil pemberdayaan masyarakat yang ada.

Hasil Umum Analisis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lembaga TNMB

Secara umum hasil pemberdayaan masyarakat oleh lembaga TNMB di kawasan TNMB menunjukkan bahwa efektifitasnya berjalan baik. Hal ini terindikasi dari rata-rata nilai efektifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan lembaga TNMB di tujuh desa di kawasan TNMB (indikasinya adalah nilai tingkat efektifitasnya sebesar 3,46). Tujuh desa itu adalah desa Wonoasri, desa Curahnongko, desa Sanenrejo, desa Andongrejo (berada di kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember), desa Kebunrejo, desa Kandangan, desa Sarongan dan Rajegwesi (berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi).

Tabel 2. Nilai efektifitas hasil pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga TNMB

DESA-DESA DI KAWASAN TNMB YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN MASY. DARI TNMB	EFEKTIVITAS HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Warga Masyarakat	Pembentukan & Pengembangan Usaha Milik Masyarakat	Pelibatan Masyarakat Dalam Rehabilitasi/Pengamanan Kawasan	Kekuatan Program Pendampingan	Nilai Total Efektivitas Pemberdayaan Masy.
WONOASRI	3,44	4,10	3,14	4,79	3,50	3,78
CURAHNONGKO	3,16	3,23	3,59	3,83	3,50	3,46
SANENREJO	2,32	3,06	2,11	2,07	3,22	2,52
ANDONGREJO	3,10	3,04	1,92	2,93	2,57	2,71
HASIL RATA-RATA	3,01	3,36	2,69	3,41	3,20	3,12
KEBUNREJO	4,21	2,99	3,08	3,89	3,78	3,64
KANDANGAN	3,65	3,38	3,37	3,88	3,76	3,62
SARONGAN DAN RAJEWESI	3,96	4,75	3,12	4,35	4,38	4,16
HASIL RATA-RATA	3,94	3,71	3,19	4,04	3,87	3,81
HASIL RATA-RATA JEMBER + BWNGI	3,47	3,53	2,94	3,73	3,54	3,46

Aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai paling berhasil adalah aspek pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi kawasan atau kegiatan pengamanan kawasan TNMB (nilai efektifitasnya 3,65), diikuti oleh aspek kekuatan program pendampingan (nilai efektifitasnya 3,46). Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektifitas pencapaiannya pada tingkatan yang sedang-sedang saja adalah aspek pembentukan dan pengembangan usaha milik masyarakat dan aspek peningkatan kapasitas warga masyarakat.

Meskipun secara garis besar penilaian terhadap efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan TNMB berjalan baik, namun ada beberapa desa di kawasan TNMB yang efektifitas pemberdayaannya

masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama di desa-desa di kawasan TNMB wilayah Kabupaten Jember. Hal ini diduga karena secara geografis letak kawasan TNMB di kabupaten Jember penduduknya mempunyai taraf pendidikan dan perekonomian masih rendah, jauh dari pos keamanan (polisi) serta jumlah personil polhutnya sedikit ditambah letaknya terpencil sehingga gangguan keamanan seperti *illegal logging* di lebih sering terjadi. Apalagi tindakan terhadap oknum yang terlibat dalam gangguan TNMB kurang tegas, sehingga masyarakat mengulangi lagi tindakan melanggar hukum tersebut, karena tindakan yang diberikan kepada pengganggu kawasan TNMB tersebut kurang memberikan efek jera.

Memang strategi pengamanan kawasan TNMB dengan cara preventif yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat di kawasan TNMB dilakukan sebagai upaya menekan terjadinya kasus *illegal logging* sudah dilakukan, tetapi yang perlu disadari bahwa sebaik apapun pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, namun jika masih ada peluang untuk melakukan perambahan dan pencurian kayu maka sebagian masyarakat akan melakukannya. Oleh karena itu pengawasan dan pengamanan kawasan TNMB secara intensif dengan intensitas memadai melalui penambahan jumlah personil polhut disertai bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan masih tetap harus ditingkatkan di masa mendatang.

Dalam penguatan kelembagaan kelompok masyarakat juga diperlukan pembinaan kelompok oleh tenaga pendamping (fasilitator) yang benar-benar memahami filosofi pendampingan kelompok serta cakap dalam mengeksplorasi potensi kelompok masyarakat dan lingkungannya untuk mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat yang bersangkutan. Tenaga pendamping tidak hanya berperan sebagai tenaga penyuluh tetapi dapat menjadi "*insider*" atau bagian dari kelompok yang dapat merasakan keterbatasan dan potensi kelompok, kreatif mengembangkan dinamika kelompok bukan sekedar pemberi informasi kepada kelompok.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan lembaga kelompok masyarakat yang dilakukan di wilayah kabupaten Jember, maupun yang dilakukan di kabupaten Banyuwangi masih kurang menekankan arti pentingnya kemandirian lembaga kelompok masyarakat atau tumbuhnya keswadayaan kelompok masyarakat bersangkutan, tetapi pembinaannya lebih menekankan pada penyuluhan kepada masyarakat agar sadar arti pentingnya kelestarian alam TNMB. Dalam taraf ini sebenarnya pembinaan yang dilakukan oleh TNMB sudah cukup berhasil karena jelas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat dibinanya menyadari arti pentingnya kelestarian TNMB. Namun jika pembinaan pada lembaga kelompok masyarakat oleh TNMB dilihat dari hasil kemandirian masyarakat atau dari hasil tumbuhnya keswadayaan lembaga kelompok masyarakat tersebut, maka hasilnya masih jauh dari harapan. Hal ini nampak jelas dari minimnya aktivitas program-program dari lembaga kelompok masyarakat (SPKP) yang bersangkutan dan kurang bersemangatnya para anggota kelompok masyarakat tersebut untuk berpartisipasi melakukan kegiatan

kelompok kecuali para pengurusnya sendiri . Bahkan sangat jelas terlihat bahwa organisasi kelompok masyarakat tersebut baru akan melakukan aktivitas kelompok apabila ada fasilitator yang menggerakkan untuk berkumpul karena ada program baru dari pemerintah (lembaga TNMB) yang ingin disampaikan kepada seluruh anggota kelompok masyarakat tersebut. Tetapi apabila tidak ada penggerak dari luar kelompok yang memintanya berkumpul untuk penyampaian informasi, maka kelompok tersebut kegiatannya vakum.

Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan TNMB Wilayah Kab. Jember

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di kawasan TNMB wilayah kabupaten Jember jika dilihat dari hasil analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan hasilnya di bawah capaian hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari sisi demografi (pada tabel 5.105), di mana terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dari penduduk di sekitar kawasan TNMB di wilayah Jember dengan kawasan TNMB di wilayah Banyuwangi. Dari total penduduk di empat desa (Wonoasri, Curahnongko, Sanenrejo dan Andongrejo) yang berjumlah 18008 orang sebanyak 1349 orang tidak bersekolah, sebanyak 4378 orang tidak tamat SD. Atau dapat dikatakan 31,38 persen dari total penduduk adalah tidak sekolah dan tidak tamat SD. Sedangkan penduduk desa-desa di kawasan TNMB di wilayah kabupaten Jember (desa Wonoasri, Curahnongko, Sanenrejo dan Andongrejo) yang lulus SLTA dan yang mengenyam pendidikan tinggi adalah sebanyak 1100 orang atau sebesar 6,1 persen dari jumlah total penduduk. Sedangkan desa-desa di kawasan TNMB di Banyuwangi yang masyarakatnya diberdayakan meliputi desa Kebunrejo, Kandangan dan Sarongan yang jumlah total penduduknya adalah sebesar 21418 orang dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah berjumlah 746 orang dan yang tidak lulus SD sebanyak 1385 orang. Atau jika dipersentase jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD adalah berjumlah 9,9 persen dari total penduduk di kawasan TNMB wilayah kabupaten Banyuwangi. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD di kawasan TNMB wilayah kabupaten Jember yaitu (9,9 persen disbanding 31,38 persen). Sedangkan penduduk kawasan TNMB di wilayah Banyuwangi yang lulus SLTA dan yang mengenyam pendidikan tinggi adalah sebanyak 4279 orang atau sebesar 19,97 persen (jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan persentase penduduk lulus SLTA dan PT di kawasan Jember yang besarnya 9,9 %). Semetara itu dari sisi pendapatan masyarakat dapat dilihat tabel 5.106 yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk kawasan TNMB wilayah Jember relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita penduduk kawasan TNMB wilayah Banyuwangi yaitu Rp 1.173.200 dibanding Rp 1.178.400 tetapi tidak terlalu

nyata. Dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa perbedaan pendidikan masyarakat dapat menjadi penyebab perbedaan hasil pemberdayaan masyarakat yang diterapkan. Penyebab lain yang diduga juga menjadi penyebab terjadinya perbedaan hasil pemberdayaan masyarakat di kawasan TNMB wilayah kabupaten Jember dengan di wilayah kabupaten Banyuwangi adalah karena karakter masyarakatnya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan TNMB wilayah kabupaten Jember kebanyakan adalah dari etnik Madura yang terkenal temperamental dan nekad serta suka bertualang sedangkan yang tinggal di kawasan TNMB di wilayah kabupaten Banyuwangi umumnya adalah dari etnik Jawa yang karakternya lebih mudah diarahkan dan diatur.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat TNMB Di Kabupaten Jember

Selama ini masyarakat mitra rehabilitasi kawasan TNMB memang sudah diwadahi dalam suatu organisasi kelompok masyarakat yang bernama SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) yang fungsinya untuk memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi dan pembinaan oleh lembaga TNMB. Namun sistem organisasi dan mekanisme kontrol terhadap segala macam bantuan berupa modal atau peralatan kepada lembaga kelompok masyarakat tersebut belum mampu menumbuhkan dan memupuk asset bagi organisasi masyarakat pedesaan yang bersangkutan agar berkembang. Hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa setelah beberapa waktu dari pemberian bantuan modal atau peralatan kepada masyarakat oleh TNMB kepada kelompok masyarakat (SPKP), ternyata perkembangan selanjutnya menunjukkan kurang terjadi perguliran kemanfaatan bantuan modal atau bagi kepentingan anggota lainnya. Bahkan dari hasil diskusi dengan para anggota masyarakat Rehabilitasi Curahnongko, kemanfaatan bantuan alat, modal atau ternak tersebut hanya dinikmati oleh beberapa anggota yang menjadi pengurus kelompok yang bersangkutan. Dengan kata lain pemanfaatan bantuan modal, peralatan, ternak dan sebagainya kepada lembaga kelompok masyarakat bersangkutan kurang terjamin perguliran dan keberlanjutannya. Sebagai contoh bantuan ternak domba atau sapi yang sudah sering diberikan TNMB kepada lembaga kelompok masyarakat ternyata dalam perkembangannya tidak jelas pergulirannya, sehingga kurang mampu memupuk dan meningkatkan akumulasi modal bagi lembaga kelompok masyarakat bersangkutan dan kapasitas kelompok masyarakat juga tidak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan kontrol terhadap asset yang dimiliki kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara untuk perbaikan upaya penguatan kelembagaan kelompok adalah dengan mengacu pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil menumbuhkan tanggungjawab, pembelajaran anggota dan keswadayaan kelompok masyarakat. Salah satu contoh yang sudah terbukti adalah pemberdayaan model PNPM yang dengan cara mekanisme kontrol dan mekanisme “tanggung renteng” di antara anggota kelompok masyarakat

bersangkutan sehingga tumbuh sistem kontrol secara demokratis dari anggota kelompok kepada sesama anggota lainnya . Penggunaan tanggung renteng pada pinjaman modal dapat menumbuhkan kekompakan dan saling belajar di antara para anggota kelompok. Hal ini terjadi karena melalui tanggung renteng jika ada salah satu anggota kelompok tidak bisa mengembalikan pinjaman modal pada waktu yang telah ditentukan, maka aturannya anggota lainnya dalam kelompok tersebut wajib ikut menanggung beban untuk mengembalikan pinjaman uang yang bersangkutan. Jika tidak maka kelompok yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bantuan pinjaman lagi kepada unit pengelola keuangan organisasi. Pada akhirnya masing-masing anggota mencoba membantu anggota yang bermasalah dalam mengembalikan pinjaman dengan cara mencari solusi bagi permasalahan usahanya. Melalui cara seperti itu, maka tidak hanya terjadi saling kerjasama antar anggota tetapi juga terjadi proses pembelajaran bagi anggota kelompok.

Dengan spirit yang sama sebenarnya kelompok petani rehabilitasi TNMB di desa Curahnongko atau Andongrejo, Wonoasri dan Sanenrejo dapat menyusun mekanisme control dan mekanisme distribusi bagi segala macam bantuan atau *asset* kelompok sedemikian rupa agar memupuk perkembangan modal bagi kelompok bersangkutan serta dapat menumbuhkan suasana demokratis dan tanggungjawab bagi anggota kelompok bersangkutan. Artinya pemanfaatan *asset* atau modal kelompok oleh anggota kelompok seharusnya dapat berkontribusi terhadap penambahan asset kelompok bersangkutan dan juga dapat memberikan pembelajaran bagi anggota kelompoknya. Memang dalam membangun mekanisme control dalam organisasi kelompok masyarakat tersebut tidak harus sama dengan model mekanisme dan sistem organisasi kelompok model PNPM, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan keterbatasan yang dimiliki lembaga kelompok SPKP. Namun essensinya adalah membangkitkan tanggungjawab anggota, membangun mekanisme control yang efektif dari anggota kepada sesama anggota yang lain, menumbuhkan kebiasaan demokratis di antara anggota kelompok sehingga ujungnya dapat mengembangkan modal kelompok serta kapasitas lembaga kelompok bersangkutan.

Oleh karena itu perbaikan upaya penguatan kelembagaan kelompok dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi kelompok masyarakat untuk menyusun mekanisme distribusi dan control terhadap asset mereka sendiri atau terhadap bantuan yang diterima. Selain itu pemberian bantuan hendaknya tidak memakai “pendekatan proyek” yaitu sekedar membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada persyaratan tertentu, tetapi seyogyanya ada persyaratan yang dapat mendorong tumbuhnya keswadayaan bagi kelompok tersebut agar akhirnya dapat meningkatkan kapasitas kelompok bersangkutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa karena seringnya masyarakat mendapat bantuan modal dengan cara yang

sudah dijelaskan di atas, maka ketika peneliti datang untuk menanyakan hal-hal yang menjadi masalah bagi perkembangan usaha mereka, umumnya mereka menyatakan kekurangan modal dan mereka sangat berharap banyak adanya bantuan modal lagi. Ketika dijelaskan bahwa bantuan hanya diprioritaskan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada dan perlu waktu dan proses untuk memperoleh bantuan, maka umumnya para pengurus kelompok tersebut menjadi kecewa dan kurang bersemangat lagi untuk membicarakan pengembangan desa melalui organisasi kelompoknya. Umumnya mereka para pengurus lembaga kelompok masyarakat di kawasan TNMB di wilayah Kab. Jember mempunyai persepsi bila ada orang dari lembaga pemerintah datang, mereka berpikir pasti akan ada “proyek” bantuan untuk masyarakat, karena merupakan “proyek bantuan” maka mereka berpikir bantuan tersebut sifatnya lunak yang bisa dimanfaatkan oleh mereka tanpa harus berpikir perlu pertanggungjawaban untuk pengembaliannya. Akibatnya mereka menjadi kelompok masyarakat yang selalu menunggu dan berharap untuk mendapatkan bantuan. Apabila tidak ada bantuan mereka enggan bergerak sehingga aktivitas program kelompoknya menjadi tidak ada atau kurang adanya inisiatif dari mereka (secara *botton up*) untuk mengembangkan program kegiatan kelompoknya sendiri walau tanpa melalui bantuan dari luar kelompok. Hal ini tentu berujung pada tidak segera menguatnya lembaga kelompok yang bersangkutan.

Untuk perbaikan ke depan kelompok-kelompok masyarakat tersebut perlu diarahkan pada pemupukan modal swadaya kelompok agar kelompok tersebut menjadi berdaya dalam mengatasi masalah anggotanya terutama masalah rendahnya taraf ekonomi mereka.

Hasil Kegiatan PRA (Participatory Rural Appraisal)

Dalam hal ini masyarakat diminta untuk menentukan dan menyepakati pemecahan masalah yang diambil dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang mereka tentukan sendiri. Masukan masyarakat tersebut selain berguna untuk kelompok masyarakat itu sendiri, juga perlu bagi balai TNMB sehingga nanti dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan di masa mendatang.

Hasil pelaksanaan metode PRA di masing-masing desa tersebut diketengahkan berikut ini 1. **1. Desa Wonoasri**

Dari hasil PRA di desa Wonoasri dapat diperoleh *Road Map* yang merupakan intisari hasil diskusi kelompok masyarakat Wonoasri sebagai berikut:

a) Tiga Tahun Pertama Desa Wonoasri :

(i) Penguatan sistem organisasi lembaga kelompok masyarakat Wonoasri terutama terkait dengan mekanisme kontrol asset modal milik kelompok

dan mekanisme distribusinya kepada anggota secara adil serta mencari upaya-upaya pengembangan asset kelompok agar terjadi akumulasi asset modal yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama bagi semua anggota organisasi

- (ii) Introduksi teknologi pengembangan sistem usahatani berbasis potensi kawasan (usahatani, usahaternak, ikan, pengolahan hasil) misalnya untuk mengoptimalkan produk yang diperoleh seperti nangka, kemiri, petai, pisang, jamur, produk tanaman herbal /jamu untuk agrofarmaka industry), ternak (sapi, kambing, domba, ayam, susu), dan pengolahan hasil tani/ternak.
- (iii) Terbentuknya produk andalan dari kawasan desa MDK (usahatani, ternak, tanaman obat, hasil olahan pertanian) yang potensial dihasilkan dari kawasan desa Wonoasri, mudah diserap pasar, dapat dilakukan pengolahan untuk diversifikasi produk.

b) Tiga Tahun Kedua Desa Wonoasri

- (i) Terwujudnya Produk Agroindustri Unggulan /Agrofarmaka dari kawasan MDK Wonoasri dan tersertifikasi oleh BPOM sehingga pasarnya minimal dapat menjangkau Kabupaten Jember
- (ii) Menguatnya sistem organisasi lembaga kelompok masyarakat desa Wonoasri terutama terkait dengan mekanisme kontrol terhadap asset modal milik kelompok dan mekanisme distribusinya kepada anggota secara adil serta terwujudnya upaya-upaya pengembangan asset kelompok agar supaya terjadi akumulasi asset modal yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama bagi semua anggota organisasi kelompok masyarakat Wonoasri

c) Tiga Tahun Ke tiga Desa Wonoasri

- (i) Pengembangan Sistem distribusi dan kinerja rantai pasok bagi produk-produk yang dihasilkan oleh desa Wonoasri untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemasarannya.
- (ii) Semakin mantabnya sistem organisasi lembaga kelompok masyarakat desa Wonoasri terutama terkait dengan mekanisme kontrol terhadap asset modal milik kelompok dan mekanisme distribusinya kepada anggota serta efektifnya upaya-upaya pengembangan asset kelompok agar supaya terjadi akumulasi asset modal yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama bagi semua anggota organisasi kelompok masyarakat Wonoasri

d) Tiga Tahun Ke empat Desa Wonoasri

Berkembangnya Pasar bagi produk-produk usaha tani /usaha ternak/agrofarmaka industri dari desa Wonoasri ke daerah-daerah lain di luar kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan model penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aspek terpenting pemberdayaan masyarakat kawasan TNMB maka urutannya adalah sebagai berikut (i) penguatan kelembagaan masyarakat (24%), (ii) pelibatan masyarakat ke dalam rehabilitasi kawasan (21%), (iii) pengembangan usaha milik masyarakat (20%), (iv) kekuatan program pendampingan (20%), (v) peningkatan kapasitas masyarakat (19%).

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNMB untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan telah berjalan dengan baik (dengan rata-rata nilai 3,46 dengan skala 1-5) , sedangkan di wilayah Jember pencapaiannya sedang-sedang saja (dengan rata-rata nilai 3,12).

Desa dengan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat paling baik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakatnya adalah desa Sarongan dan Rajegwesi yang kegiatannya terkait dengan ekowisata (4,16 untuk skala 1-5)) sedangkan untuk wilayah Jember desa yang pencapaian kegiatan pemberdayaannya cukup baik adalah desa MDK Wonoasri (3,78 untuk skala 1-5)

Penguatan kelembagaan kelompok di desa-desa MDK di kawasan TNMB wilayah Jember belum sesuai harapan (nilai rata-ratanya 3,01) jika dikaitkan dengan mekanisme kontrol yang belum efektif terhadap bantuan-bantuan yang diberikan pada masyarakat, sehingga keberlanjutan dan perkembangan manfaat dari bantuan-bantuan kepada masyarakat tersebut menjadi kurang efektif untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Desa dengan pencapaian hasil yang relatif rendah pemberdayaan masyarakatnya dan masih perlu ditingkatkan adalah desa Sanenrejo (nilai rata-ratanya 2,52) dan Andongrejo (2,71).

Titik berat kegiatan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan TNMB lebih mengarah pada kegiatan penyuluhan masyarakat tentang arti pentingnya kelestarian kawasan TNMB namun kurang mengarah pada upaya pembangkitan “keswadayaan” masyarakat.

Hasil pendekatan PRA yang dilakukan secara umum diperoleh Road Map sebagai berikut : Tahap I (2015-2018) : (i) Penguatan Sistem Organisasi

Lembaga Kelompok Masyarakat (ii) Introduksi Teknologi Sesuai Kebutuhan MDK; (iii) Teridentifikasinya Produk Andalan MDK. Tahap II (2018-2021) : (i) Berkembangnya Produk Agroindustry /Agribisnis /ternak / agrofarmaka Berbasis Kawasan (ii) Menguatnya Sistem Organisasi Lembaga Kel. Masyarakat. Tahap III (2021- 2024): (i) Berkembangnya Sistem distribusi dan Efisiennya Kinerja Rantai Pasok Desa MDK, (ii) Pengembangan Wisata Edukasi Pelestarian Lingkungan dan kawasan

Introduksi teknologi sesuai kebutuhan untuk pengembangan sistem usaha tani /ternak di kawasan sesuai dengan potensi kawasan disertai dengan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat; Tahap II : Penentuan dan pengembangan produk agroindustri unggulan yang khas kawasan; Tahap III: Pengembangan pasar

Pencapaian hasil untuk pengembangan usaha milik masyarakat di desa-desa kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan karena nilai rata-ratanya 2,69. Adapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kawasan untuk pengembangan usaha adalah lemahnya penguasaan teknologi untuk memanfaatkan potensi kawasan dan lemahnya pemasaran dan permodalan

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja K., Hikmat H. 2004. *Participatory Research Appraisal , Dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat*. Penerbit Humaniora Utama Press.
- Creswell, John W, (2008). *Edocational Research : Planning, Conducting, and Eevaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey Pearsonn.
- Darmadja B., Guntoro DA., Atmojo ND., Prasojo W. (2012). *Buku Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Taman nasional Meru betiri*. Penerbit TNMB
- DuBois, B., Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston : Allyn and Bacon
- Aryadi M. (2012). *Hutan rakyat. Fenomenologi Budaya Masyarakat*. UMM. Press Malang. 2012.
- Endarto , Zauhar S., Haryono BS. (2013). *Conservation Area Management Plan in Community E mpowerment Perspective (Study on Kelimutu National Park in the District of Ende, East Nusa Tenggara Province, Indonesia)*. Journal of Basic and Applied Scientific Research. J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(2)1-11, 2013. ISSN 2090-4304
- Hamid R., Zulkarnaeni, Saam, Z. (2011). *Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan, Pasca Kegiatan HPH PT. Siak Raya Timber, Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Lingkungan 2011:5 (2) Pasca Kegiatan ISSN 1978-5283 Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

- Suharto, E.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama. Jakarta.
- Bhattarai, S, Prakash K. Jha, and Chapagain N (2009). *Towards Pro-Poor Institutions: Exclusive Rights to the Poor Groups in Community Forest Management*. Proceeding of Forest Action Discussion Paper 2009/1. DFID funded Livelihoods and Forestry Forestry Programme in Nepal.
- Hendarman dan Nusa Putra (2013). *Mixed Method Research* (Metode Riset Campur Sari). Konsep, Strategi dan Aplikasi. Indeks. Jakarta.
- Onwuegbuzie dan Johnson A. (2008). *Mixed Method Analysis and Information Visualization : Graphical Display for Effective Communication of Research*. Result: [http:// www.wtgrantmixedmethods.com/pdf-files/onwuegbuzie=Dickinson](http://www.wtgrantmixedmethods.com/pdf-files/onwuegbuzie=Dickinson).diunduh 6-01-2012.
- Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM (2007) *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani. the Playing Field Project . Perhutani. dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa*
- Rujito, Hari (2011). *Analisis Strategi Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Agroforestry Di Sekitar Kawasan Taman nasional Meru Betiri . Agritop, Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Sciences)*. Vol. 9 No. 1 Juni 2011
- Supratman (2008). *hedevlopment of community-based enterprises in the forest areas (case study of villages surrounding IUPHHK of Mamuju Regency, West Sulawesi Province*. Jurnal Hutan dan Masyarakat 2 (3). 303-312
- Suharso, Puguh (2010). *Model Analisis Kuantitatif "TEV" . Teori dan Konsep* (Instrumen kebijakan Publik). Penerbit INDEKS, Jakarta. 2010.
- Utami, H.N. 2006. *Keberdayaan, Kemajuan, dan Keberlanjutan Usaha Pengrajin: Kasus Kab . Sidoarjo dan Magetan Provinsi Jawa Timur*. Bagian dari disertasi disampaikan pada Seminar SPS IPB, tanggal 28 Agustus 2006.
- Lachapelle P.R., McCool SF., Smith P D.,(2004). *Access to Power or Genuine Empowerment? An Analysis of Three Community Forest Groups in Nepal*. Human Ecology Review, Vol. 11, No. 1, 2004
- Nurrohmat, Dodik Ridho(2005). *Strategi Pengelolaan Hutan : Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*. (Penerbit Pustakaa Pelajar, yogjakarta).
- Sidu, Dasmin (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Di Mamuju*. Disertasi . PPS. IPB
- Amasy O. (2004). *"Keadilan, Pemberdayaan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Blantika Mizan, 2004.
- Sumpeno, W (2008). *The Capacity Building, Fasilitator Genius, Kiat efektif Mendampingi Masyarakat*. Excellent Management Center
- Siswoyo (2003), *Pengelolaan Taman nasional Meru Betiri melalui Program Sosial Forestry*, Balai Taman Nasional Merubetiri, Jember